

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAKi

KATA PENGANTARii

DAFTAR ISIv

BAB I PENDAHULUAN1

- A. Latar Belakang Masalah1
- B. Rumusan Masalah8
- C. Tujuan Penelitian9
- D. Kegunaan Penelitian9
- E. Kerangka Pemikiran10
- F. Metode Penelitian15

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PEMERINTAH DAERAH, PENYELESAIAN SENGKETA, KERAPATAN ADAT NAGARI19

- A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah19
 - 1. Pengertian Pemerintah Daerah19
 - 2. Kewenangan Pemerintah Daerah23
 - 3. Asas Pemerintah Daerah26
 - 4. Pembagian Urusan-Urusan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201432
- B. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa38
 - 1. Pengertian Penyelesaian Sengketa38
 - 2. Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan (Litigasi)39
 - 3. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Non Litigasi)41
 - 4. Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Adat Minangkabau43
- C. Tinjauan Tentang Kerapatan Adat Nagari (KAN)50
 - 1. Pengertian Kerapatan Adat Nagari (KAN)50
 - 2. Tugas dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari51

BAB III ANALISIS PELAKSANAAN KEWENANGAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ADAT

**MINANGKABAU DIHUBUNGKAN DENGAN PERDA NOMOR 7 TAHUN
2018 TENTANG NAGARI**53

A. Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelesaian Sengketa Adat	53
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Pelaksanaan Kewenangan Penyelesaian Sengketa Adat Minangkabau	64
C. Upaya Untuk Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Pelaksanaan Kewenangan Penyelesaian Sengketa Adat Minangkabau	78
BAB VI PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



uin
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG